

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini sepeda motor adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Perkembangan yang cukup pesat dibidang transportasi dapat dilihat dari berbagai jenis kendaraan transportasi yang digunakan oleh masyarakat ataupun konsumen saat ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis-jenis kendaraan yang beredar dan digunakan masyarakat pada saat ini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mempermudah dan merealisasikan kehidupan mereka sehari-hari.

Berkaitan dengan perkembangan saat ini dapat dinilai bahwa hukum juga memiliki arti sebagai jalinan nilai. Ia bertujuan menserasikan nilai-nilai obyektif yang universal tentang baik dan buruk, patut dan tidak patut, sedemikian rupa untuk mencerminkan rumusan perlindungan kepentingan antar individu, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak, dengan ketentuan yang merupakan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum bisnis maupun keperdataan, seperti lembaga keuangan bank sendiri pada prakteknya saat ini juga melayani kredit, pinjaman dan jasa keuangan pada masyarakat. Tetapi lembaga keuangan perbankan tidak cukup ampuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam, lembaga keuangan perbankan juga

---

<sup>1</sup> Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 406

kelihatannya membatasi penyaluran kredit, hal ini dapat dilihat dari prinsip kehati-hatian, hal ini dilakukan oleh lembaga perbankan agar bank tidak mudah memberikan kredit kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan. Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk membeli secara tunai maka timbul lembaga pembiayaan non bank sebagai membantu sistem perekonomian masyarakat.

Kondisi seperti ini disatu sisi mempunyai manfaat dan keuntungan bagi masyarakat karena kebutuhan barang yang diinginkan sesuai dengan selera dapat terpenuhi dengan mudah khususnya di bidang transportasi, hal ini dapat dilihat dengan adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Meningkatnya penjualan sepeda motor di Indonesia belakangan ini tidak terlepas dari peran serta lembaga pembiayaan.

Pembelian sepeda motor secara kredit terdapat dua jenis sepeda motor yaitu sepeda baru dan sepeda motor *secound* (bekas), dalam hal ini penulis lebih memfokuskan untuk membahas pembelian sepeda motor secara kredit dengan jenis sepeda motor *secound* (bekas), karena masyarakat Kota Medan Marelan sendiri lebih banyak memilih pembelian sepeda motor bekas secara kredit. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup dan gaya masyarakat Kota Medan Marelan. Dalam sistem pembelian sepeda motor bekas secara kredit ini tentunya memiliki perbedaan dengan sistem pembelian sepeda motor baru secara kredit. Pihak lembaga pembiayaan sendiri sudah menentukan tinggi dan rendahnya satandart pembayaran pokok peratama dan bunga dari setiap jenis sepeda motor tersebut.

Pengertian Lembaga pembiayaan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 yang berbunyi “lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Bahkan menurut pengamatan saat ini 80% penjualan sepeda motor di Indonesia melalui jalur kredit yang dibiayai oleh pihak lembaga pembiayaan. Maka tidak heran jika bisnis lembaga pembiayaan kemudian menjadi lahan yang subur untuk mengembangkan uang. Sistem pembayaran kredit sendiri dapat mempermudah setiap masyarakat untuk membeli dan memiliki sepeda motor, pembayaran secara kredit adalah salah satu sistem pembelian yang ditawarkan oleh pihak *showroom* terhadap pembeli atau konsumen, karena tidak semua pembeli dapat melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tunai, dan mungkin hanya sebagian masyarakat yang dapat membeli dengan sistem pembayaran tunai.

Pada prinsipnya yang digunakan dalam pembelian sepeda motor secara kredit ini, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian jual beli dengan angsuran. Dimana perjanjian jual beli ini barangnya seketika diserahkan dalam miliknya si pembeli, namun harganya boleh dicicil.<sup>2</sup> Dengan demikian maka pembeli seketika sudah menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan tinggalah ia mempunyai hutang kepada penjual berupa sebagian atau sisa harga dari harga yang belum dibayarnya.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra aditya Bakti, 1995, hlm. 55

CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan adalah salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak dalam usaha pembiayaan kredit. CV. Sinar Jadi Kencana Motor memberikan pelayanan kredit pada masyarakat dengan mengharapkan laba atau keuntungan yang diperoleh dari bunga kredit tersebut, persaingan yang ketat di dunia pembiayaan mendorong lembaga pembiayaan harus lebih siap dalam memberikan segala fasilitas kredit dan harus lebih siap dan tidak bertentangan dari hukum untuk menangani setiap masalah yang akan timbul.

Perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.<sup>3</sup> Sementara yang dimaksud dengan pembayaran Kredit adalah pembayaran yang dilakukan dengan beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi.<sup>4</sup> Permasalahan yang selalu timbul dari pihak pembeli dalam pembelian sepeda motor bekas dengan sistem kredit ini adalah yaitu adanya pembayaran kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pihak lembaga pembiayaan.

Perjanjian mengikat yang timbul dari kata sepakat sering sekali diingkari oleh salah satu pihak dari mereka yang membuatnya, salah satunya yaitu perjanjian pembelian sepeda motor secara kredit. Dalam perjanjian ini permasalahan yang sering terjadi yaitu kredit macet. Pada dasarnya kredit

---

<sup>3</sup> Abdul Djamil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 164

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. Cetakan ke II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 27



macet ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan konsumen, tetapi berdasarkan keadaan yang memaksa dan mengharuskan konsumen terlambat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang, sehingga terjadilah kredit macet.

Kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya bukan berarti masyarakat tidak berniat lagi untuk memenuhi kewajibannya, tetapi konsumen melakukan penundaan dan meminta jangka waktu terhadap pihak lembaga pembiayaan untuk terlambat melakukan pembayaran kredit tersebut. Karena adanya pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang meningkat juga memberikan dampak pada kebutuhan, pendapatan yang diperoleh ekonomi yang relatif rendah.

Sepeda motor bekas adalah salah satu solusi bagi masyarakat ekonomi rendah untuk tetap bisa memiliki kendaraan, karena harga sepeda motor bekas jauh lebih murah dibandingkan harga sepeda motor baru, jika pembelian sepeda motor bekas dilakukan dengan sistem pembayaran kredit melalui lembaga pembiayaan persentase bunganya sudah otomatis lebih kecil dibandingkan dengan sepeda motor yang baru.

Dalam dunia usaha pembiayaan masalah kredit macet adalah permasalahan yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan pembiayaan, karena sistem pembayaran kredit memiliki sifat pembayaran dengan angsuran yang harus dilakukan secara rutin setiap bulanya, sementara keadaan ekonomi masyarakat Indonesia tidak selalu stabil. Pemberian kredit ini adalah menganut unsur kepercayaan, yang artinya pihak lembaga pembiayaan mempercayai pihak konsumen, bahwa konsumen akan membayar kreditnya dengan lancar.

Tetapi lembaga pembiayaan kredit dilema antara produktifitas kredit yang disalurkan dengan kualitas kredit. Pada dasarnya pihak pembiayaan menginginkan penyaluran kredit yang banyak dan berkualitas agar mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan adanya target dari setiap lembaga pembiayaan menjadi tekanan terhadap produktifitas, yang membuat para petugas yang terkait tidak begitu mementingkan dari penilaian kredit itu sendiri.

Kredit yang sudah disalurkan oleh lembaga pembiayaan seharusnya selalu diawasi sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan pembiayaan itu sendiri, karena dengan adanya penyaluran kredit itu dianggap sebuah piutang. Maka sangat penting dalam hal ini perusahaan pembiayaan untuk lebih teliti, karena permasalahan yang selalu terjadi sering sekali disebabkan oleh kesalahan perusahaan itu sendiri yaitu dalam menganalisa kelayakan debitur dan pengawasan kredit.

Masyarakat Kota Medan Marelan sendiri adalah termasuk masyarakat yang memiliki penghasilan dan pendidikan yang cukup minim, karena persaingan pasar yang besar dengan orang China, membuat masyarakat Kota Medan Marelan harus berkerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kota Medan Marelan adalah petani, buruh dan karyawan swasta, hal ini yang menjadi terobosan CV. Sinar Jadi Kencana Motor untuk membuka lembaga pembiayaan dengan produk sepeda motor bekas. Dan hal ini menjadi pilihan satu-satunya untuk masyarakat Kota Medan Marelan, pada kenyataannya di CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan

penjualan sepeda motor bekas dengan kredit lebih besar jika dibandingkan dengan penjualan sepeda motor baru.

Seharusnya sebelum memberikan kredit, pihak kreditur melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C yaitu :<sup>5</sup>

1. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 394

4. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
5. *Condition of economic*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Penyelesaian yang sering sekali dilakukan untuk masalah kredit macet oleh perusahaan pembiayaan yaitu dengan melakukan pembebanan denda yang besar dan eksekusi yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan, dimana mereka tidak memandang atau tidak mempertimbangkan sudah berapa lama angsuran kredit berjalan, artinya dalam pembebanan denda yang besar dan penarikan ini, lembaga pembiayaan tidak mempertimbangkan walaupun masa kredit tinggal sedikit lagi, hal yang sering terjadi saat ini, tindakan ini dapat dikatakan dengan penarikan ilegal, karena penarikan yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti penarikan sepihak tanpa adanya putusan dari pengadilan, mengingat perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang dalam CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan tidak melakukan pendaftaran fidusia atas objek perjanjian tersebut, maka tidak ada yang bersifat kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan landasan jika terjadi wanprestasi.



Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai eksistensi dari jaminan fidusia tersebut. Praktek yang seharusnya dilakukan oleh pihak pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terdapat dalam Pasal 1 angka (5), yang berbunyi sebagai berikut : “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia<sup>6</sup>” Dalam hal ini sudah selayaknya apa yang seharusnya menjadi hak konsumen diperhatikan, karena yang terjadi selama ini tindakan *debt collector* yang sering sekali mengabaikan hak-hak konsumen. Seperti hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan dilarang mencantumkan klausula.

Perjanjian kredit bukan merupakan perjanjian yang lahir dari Undang-Undang melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu yaitu antara kreditur dan debitur. Yang menjadi fokus perhatian adalah ketika terjadi suatu wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur ataupun kreditur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Dalam kaitanya perjanjian dengan jual beli yaitu dengan sistem pembayaran secara berkala, seperti jual beli dengan angsuran yang pelunasan dari harga pembelian yang telah disepakati dilunasi dengan cara berkala dalam waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya perjanjian jual beli dengan

---

<sup>6</sup>Ahmad miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004 hlm. 37.

angsuran ini peralihan hak miliknya beralih ketika barang tersebut diserahkan oleh kreditur kepada debitur walau pun pelunasan belum terjadi.

Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang tidak dibebani dengan jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi sering sekali menempuh cara yang salah dalam menempuh proses penyelesaian. Perjanjian penyerahan barang secara fidusia yang hak milik atas sesuatu benda tersebut, maka kreditur atau yang mempunyai piutang menjadi pemilik dari benda tersebut. Berarti kedudukan kreditur lebih kuat dari pada debitur. Untuk memperkuat kedudukan tersebut maka penting bagi kreditur untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar terpebuih dan terlaksana suatu proses penyelesaian yang baik dengan adanya suatu kepastian hukum.

Melihat dan membaca Peraturan-Peraturan tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang pembebanan denda yang diterapkan oleh pihak lembaga pembiayaan, hal ini juga sering menimbulkan permasalahan antara kreditur dan debitur. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik yaitu mempermudah pendaftaran fidusia tersebut. Untuk terwujudnya kepastian hukum dan penyelesaian kredit macet yang baik maka selain perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang harus diikuti perjanjian lain yang dapat menjamin kepastian hukum para pihak, terutama pengaturan yang mengatur bagaimana prosedur dalam penyelesaian kredit macet dan eksekusi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. namun prakteknya di lapangan lembaga pembiayaan belum juga secara keseluruhan mendaftarkan perjanjian fidusianya, termasuk salah

satunya yaitu CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan, hanya melakukan perjanjian kuasa pembebanan jaminan fidusia oleh para pihak atau dapat dikatakan dibawah tangan. Seahrusnya walaupun objek dari jaminan fidusia itu adalah barang yang bekas, tetap harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, agar dapat menjamin secara jelas dan pasti terhdap para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 Tahun 1999, apabila transaksi tidak didaftarkan, maka secara hukum perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekusi dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum, dan tidak terdapat kepastian hukum dalam perjanjian tersebut. Dan CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan, sebagai lembaga pembiayaan yang objek jaminanya adalah bersifat motor bekas, belum dan tidak mendaftarkan akta fidusianya.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis/tesis yang berjudul: **Penyelesaian Kredit Macet Jual Beli Sepeda Motor Bekas Dengan Angsuran Pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan?

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan?
3. Bagaimana proses eksekusi kredit macet jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini adalah dalam kerangka pengembangan ilmu hukum sehubungan dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai suatu proses). Paradigma ilmu tidak akan berhenti dalam penggaliannya atas kebenaran dalam bidang kredit dan jual beli dengan angsuran. Berkaitan tentang pembebanan denda dan berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen secara *fides* atau kepercayaan.

#### 2. Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum seperti yang telah disebutkan di atas, juga terdapat tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan



- b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan
- c. Untuk mengetahui proses eksekusi kredit macet jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya, maupun di bidang keperdataan dan kredit, khususnya terutama tentang jual beli dengan angsuran dalam lembaga pembiayaan konsumen.
2. Manfaat Praktis, memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah maupun lembaga perbankan dan pembiayaan konsumen dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian yang kredit yang terdapat di lembaga pembiayaan khususnya yang menyangkut jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh lembaga pembiayaan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta bahan masukan bagi masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Secara spesifik judul penelitian yang dilaksanakan ini, belum pernah dilakukan pada perusahaan pembiayaan di Kota Medan khususnya di bidang sepeda motor bekas, ada pun tesis yang relatif sama dengan yang ini diteliti oleh penulis adalah peneliti yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang dilakukan oleh Muethia Anwar yang berjudul: Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak DiDaftarkan (studi pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk) yang memfokuskan penelitiannya tentang pelaksanaan eksekusi. Ada pun judul lain yang relatif sama yaitu yang diteliti oleh Putu Helena Evie Oktyavina Sridina Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Kredit Dengan Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Kota Denpasar). Yang memfokuskan penelitiannya tentang eksekusi perjanjian kredit pada koperasi. Sementara penulis membahas mengenai Penyelesaian Kredit Macet Jual Beli Sepeda Motor Bekas Dengan Angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan dan tulisan ini mengkaji khusus tentang penyelesaian kredit macet terhadap pembelian sepeda motor bekas dengan angsuran, dalam arti dapat dikatakan bahwa tulisan ini mempunyai ciri khas tersendiri.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Keadilan**

Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya "*Nichomachean ethics*" artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their*

*inequality*”. Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.<sup>7</sup>

Teori keadilan, keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama dalam mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif.<sup>8</sup> Alasan Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan adalah :<sup>9</sup>

1. Menurut Adam Smith yang dikatakan keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan kumulatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.
2. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan kumulatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan kumulatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.
3. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya

---

<sup>7</sup> Robert Reiner, dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 48

<sup>8</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 85

<sup>9</sup> <http://arrafim.blogspot.co.id/keadilan.html>, diakses pada Senin 08 Februari 2016

atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

b. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Kepastian hukum sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Menurut Sudikno<sup>11</sup> kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan kepastian karena hukum itu adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum

---

<sup>10</sup> <http://www.google.co.id> – teori keadilan.htm diakses pada Kamis 28 April 2016

<sup>11</sup> <http://www.tesishukum.com//> teori kepastian hukum.htm diakses pada Jumat 29 April



diatur dalam perundangundangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

c. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>12</sup> Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah benteng untuk menghalangi kewenangan-kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, dan cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>14</sup> Penyelesaian juga dapat diartikan sebuah proses yang paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan, pemecahan

---

<sup>12</sup> Ahma Miru dan Sutarman Yodo, *Op, Cit*, hlm. 1-2

<sup>13</sup> Salim Hs & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 259.

<sup>14</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, dalam *Op, Cit*, Salim Hs, hlm 135

masalah telah didefinisikan sebagai proses hubungan tingkat tinggi yang memerlukan perubahan dan kontrol lebih dari keterampilan dan keahlian dasar.

## **b. Perjanjian**

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan, rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata orang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Secara otomatis perjanjian melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang secara khusus diatur mulai dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan.<sup>15</sup> Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh

---

<sup>15</sup> Lukman santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jakarta , Cakrawala, 2012, hlm. 8

para pihak , tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang di buat tersebut.

Menurut Subekti, bahwa persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama, terkadang bahkan digunakan bersamaan karena perjanjian itu sendiri sebenarnya juga adalah persetujuan.<sup>16</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu dan
4. Adanya sebab yang halal.

Pasal 1320 ini, merupakan Pasal yang sangat penting dalam sebuah perjanjian karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau biasa disebut syarat objektif.

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, citra aditya Bakti, 1998, hlm 1

Selain syarat sahnya perjanjiannya yang telah dijelaskan di atas, perjanjian itu sendiri juga memiliki unsur-unsur, ada pun unsur-unsurnya sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Unsur *essensialia*, yaitu unsur yang menyangkut syarat sahnya perjanjian.
2. Unsur *naturalia*, yaitu unsur perjanjian yang melekat pada perjanjian itu.
3. Unsur *accidentalia*, yaitu unsur yang harus tegas dimuat dalam perjanjian.

#### c. Perjanjian Kredit

Pengertian kredit sebagaimana menurut Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga”. Kredit memiliki arti adanya suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang harus diberikan sekarang oleh debitur kepada kreditur.

Pengertian lain tentang kredit, menurut Reymont P. Kent yang dikutip dari buku Thomas Suyatno dan kawan-kawan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Menurut

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 108



melayu S.P hasibuan<sup>18</sup> memeberikan pengertian kredit bahwa kredi adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian telah disepakati.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjajian bernama dalam KUHPerdara yang disebut dengan paerjanjian kredit. Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya tambah dengan klasul-klasul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan.

Maka jika terjadi suatu sengketa antara pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat pada pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>19</sup>

Namun pada dasarnya hukum kontrak atau perjanjian dikuasai oleh 3 prinsip yaitu:

1. Prinsip bahwa umumnya persetujuan-persetujuan diadakan tidak secara formil, melainkan secara konsensual. Prinsip bahwa para pihak harus
2. memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing atau sebagaimana Pasal 1374 BW lama mengungkapkannya

---

<sup>18</sup> Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 87

<sup>19</sup> Sunarhoko. *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana. 2004, hlm 15.

bahwa persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakanya.

### 3. Prinsip kebebasan berkontrak.<sup>20</sup>

Tentang perjanjian kredit jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara yuridis, perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (hal) segi pandang sebagai berikut:

- a) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.
- b) Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.

Dengan demikian, yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- 2) Adanya para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur.
- 3) Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
- 4) Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang atau barang.
- 5) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

#### d. Jual Beli

Jual beli sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli ini termasuk dalam perjanjian bernama (*benoende overeenkomst*) yang diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab V Pasal 1457 KUHPerdata

---

<sup>20</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*. Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 101.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. Cetakan ke II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 111

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, sedikit-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*) yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Prancis disebut hanya dengan "*vente*" yang juga berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*Kauf*" yang berarti "pembelian".<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Subekti, Op, Cit, Hlm 1

Angsuran adalah uang yang dipakai untuk mengangsur (utang, pajak, dan sebagainya).<sup>23</sup> Sementara pengertian lain tentang angsuran adalah pembayaran kredit atau cicilan uang tunai sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran, yang biasanya dipakai untuk utang, pajak dan sebagainya.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Suatu penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang objektif, harus mempunyai sistem kerja yang bersifat ilmiah yang didukung oleh data-data yang akurat atau bahan-bahan yang konkrit. Metode penelitian<sup>25</sup> adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang dipergunakan untuk penelitian tesis ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian jual beli dengan angsuran dan tentang perusahaan pembiayaan konsumen. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>24</sup> <http://www.brainly.co.id>. Pengertian angsuran.htm diakses pada Senin 24 Oktober 2016

<sup>25</sup> Soerjono Soelkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2005,



peraturan yang bersifat normatif belaka, tetapi juga dilihat dari perilaku masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal berhubungan dengan penyelesaian kredit macet jual beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan. Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>26</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terkait yaitu CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang bersifat formulir dan apabila ada permasalahan baru dan aktual terjadi dilapangan pada perusahaan pembiayaan konsumen, peneliti akan langsung menjelaskan apa yang menjadi permasalahan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

---

<sup>26</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 63

Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata
- 2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan informan, dalam hal ini adalah :

1. Juraini Sulaiman S.H., M.Hum Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara.

2. Heri Irawan S.E *Collection Head* CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan
3. Zulkhaidir *Surveyor* CV. Sinar Jadi kencana Motor Kota Medan
4. Jhones Situmorang *Debt Collector* CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan
5. Nasabah CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan

Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perpaduan keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam dan rinci.

- b. Studi Dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Seperti data-data yang ada atau yang diperoleh dari CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan dan data yang diperoleh dari Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

#### **4. Teknik Sampling**

dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling (non random sampling) atau sampel bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini dipilih oleh peneliti, karena pertimbangan keterbatasan jarak, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti,

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang jumlahnya besar. Oleh karena itu, berdasarkan teknik yang dipilih maka yang peneliti menetapkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang konsumen CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan, dengan permasalahan yang dihadapi nasabah adalah keterlambatan pembayaran angsuran sehingga pembebanan denda dan sepeda motor bekasnya dieksekusi.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data.**

### **a. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Proses ini dilakukan untuk meneliti dan mengoreksi ataupun melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

### **b. Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa data adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa. Kemudian disusun untuk menggambarkan tentang Penyelesaian Kredit Macet Jual Beli Sepeda Motor Bekas dengan angsuran Pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan. Sehingga data ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisanya sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini yang dibahas mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang alasan-alasan yang mendorong dilakukanya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan kepustakaan yang membahas tinjauan umum tentang pengertian penyelesaian, perjanjian, kredit, jual beli dan tinjauan tentang perusahaan pembiayaan konsumen.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasanya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah di masa yang akan



datang serta berisikan saran atau masukan berkenaan dengan permasalahan yang ada.

